

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KENDAL
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1.URUSAN PENDIDIKAN
2.URUSAN KEBUDAYAAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan atau lebih

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ⁱ (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Anggaran:2.378.072.000 Realisasi: 253.879.800 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Anggaran: 61.006.548.300 Realisasi: 43.593.975.364 3. Program Pendidikan Non Formal Anggaran: 5.111.959.000 Realisasi: 3.180.374.500 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anggaran: 14.983.705.000	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Program Pengembangan Nilai Budaya Anggaran: 1.075.450.000 Realisasi: 797.500.000 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Anggaran: 2.157.000.000 Realisasi: 1.540.942.644 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Anggaran: 1.060.500.000 Realisasi: 390.150.000 4. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Anggaran: 35.000.000 Realisasi: 33.100.000	6 Program	5 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Realisasi: 13.047.497.386 5. Program Menejemen Pelayanan Pendidikan Anggaran: 22.563.900.000 Realisasi: 22.043.911.799 6. Program Menejemen Pelayanan Pendidikan Anggaran: 22.563.900.000 Realisasi: 22.043.911.799	5. Program Pengembangan Kemitraan Anggaran: 900.000.000 Realisasi: 633.183.750			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	46 SOP Tentang : 1. SOP ttg Proses Pendataan Pendidikan 2. SOP ttg Penyusunan LAKjiP 3. SOP ttg Penyusunan Renja SKPD 4. SOP ttg Penyusunan RKA dan DPA 5. SOP ttg Penyusunan POK 6. SOP ttg usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan BMD 7. SOP ttg Laporan semesteran Barang Milik Daerah 8. SOP ttg Usulan Penjualan Barang Milik Daerah 9. SOP ttg Mutasi/ Penghapusan Barang	Apabila Ada, sebutkan ada 7 SOP yang terdiri dari: 1. SOP tetang Pencairan LS Belanja Tidak Langsung Kelompok Gaji dan Tunjangan 2. SOP ttg Pencairan Pengadaan barang dan Jasa 3. SOP Ttg Pendataan Cagar Budaya 4. SOP ttg Ijin Pentas 5. SOP ttg Rekomendasi Izin Pemilikan Benda Cagar Budaya 6. SOP ttg Usulan Karya Industri Budaya untuk dipatenkan 7. SOP ttg Rekomendasi Izin Pemindahan Benda Cagar Budaya	Ada 46 SOP	Ada 7 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Milik Daerah 10. SOP ttg Penerimaan tamu 11. SOP ttg Siswa/ Mahasiswa Magang 12. SOP ttg Rapat Dinas 13. SOP ttg Laporan Kepegawaian 14. SOP ttg Rekomendasi ijin belajar 15. SOP ttg Surat masuk 16. SOP ttg Pensiun PNS 17. SOP ttg Pengesahan FC ijazah/STTB/ ijazah paket/ SKYBS/ Surat Keterangan Pengganti 18. SOP ttg Cuti PNS 19. SOP ttg Rekomendasi Pindah Sekolah 20. SOP ttg Kenaikan Gaji Berkala (KGB) 21. SOP ttg Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB, Ijazah Paket dan SKYBS 22. SOP ttg Surat keluar 23. SOP ttg Rekomendasi Penelitian 24. SOP ttg Pencairan LS Belanja Tidak Langsung Kelompok Gaji dan Tunjangan 25. SOP ttg Pencairan Pengadaan Barang dan Jasa 26. SOP ttg Pencairan Nota Pencairan Dana (NPD) 27. SOP ttg Pembangunan				

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Gedung Perpus 28. SOP ttg Pengadaan Buku Perpus Sekolah SD 29. SOP ttg Rehab Gedung SD. 30. SOP ttg PPDB 31. SOP ttg Mutasi Siswa 32. SOP ttg Program Indonesia Pintar 33. SOP ttg pembinaan minat bakat Siswa Lomba Dokter Kecil 34. SOP ttg Analisa kerusakan Gedung 35. SOP ttg Bantuan Sarpras 36. SOP ttg rehab Gedung Sekolah 37. SOP ttg Legalisir Ijazah Kejar Paket A, Paket B, Paket C 38. SOP ttg Pelayanan NPSN 39. SOP ttg Ijin Pendirian LKP 40. SOP ttg Ijin Pendirian PAUD 41. SOP ttg Ijin Pendirian PKBM 42. SOP ttg Ijin Pendirian SPS 43. SOP ttg Ijin Pendirian TBM 44. SOP ttg Permohonan SKPP Pensiun, Janda/Duda/ Pindah Tugas 45. SOP ttg Ijin Pendirian Sekolah Baru 46. SOP ttg Permohonan				

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Kenaikan Pangkat, SKGB, Pensiun dan KARPEG bagi Pegawai (Pendidik dan Tendik)				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	- Perda pelaksanaan sebanyak 1 buah Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal - Perda Nomor 04 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kendal - Perda yang seharusnya dilaksanakan menurut Permendiknas No. 15 / 2010 ttg SPM Pendidikan Dasar ada sebanyak 1 buah	- Perda pelaksanaan sebanyak 0 buah - Perda yang seharusnya ada sebanyak 0 buah	ada	Tidak ada	Sumber data di Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAA N DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 21 - Jabatan yang ada, sebanyak 21	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 (Empat) - Jabatan yang ada, sebanyak 4 (empat)	100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Jabatan Fungsional di Dinas Pendidikan: - Pengawas Sekolah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,	ada	tidak ada	Sumber data BKD/DUK perangkat Daerah mengacu kondisi perangkat daerah terakhir/updated tahun 2019

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						2. Penilik Sekolah 3. Guru				
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan Pendidikan (1) Perangkat Daerah , sebanyak Guru PNS 4600 Personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.348 personil	- PNS yang menangani urusan Kebudayaan (1) Perangkat Daerah , sebanyak 9 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.348 personil	55,10 %	0,11 %	Sumber data BKD/DUK perangkat Daerah mengacu kondisi perangkat daerah terakhir/updated tahun 2019/BKD
			7	pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 21 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 21 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 4 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	100 %	100 %	Sumber data perangkat Daerah mengacu kondisi terakhir/updated tahun 2019
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 21 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 21 jabatan	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %	100 %	Sumber data perangkat Daerah mengacu kondisi terakhir/updated tahun 2019
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2017, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA Perangkat Daerah 2. RENJA Perangkat Daerah 3. RKA- Perangkat Daerah 4. DPA Perangkat Daerah	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2018, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA Perangkat Daerah 2. RENJA Perangkat Daerah 3. RKA- Perangkat Daerah 4. DPA Perangkat Daerah	4 jenis dokumen	4 (empat) jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program Renja Perangkat Daerah yang	100	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-SKPD ybs. Pada RPJMD Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Bidang Pendidikan

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					ditetapkan pada RPJMD x 100%	dalam RPJMD, sebanyak 5 Program	ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 5 program			terdapat 8 Program dimana Program ke 8 yaitu Program Fasilitasi Pendidikan Tinggi adalah Program milik Akademi Kebidanan Kabupaten Kendal).
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program (4 Rutin dan 6 Program Pendidikan). - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program (4 Rutin dan 5 Program Pendidikan).	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program (4 Rutin dan 5 Program Pendidikan). - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 9 program (4 Rutin dan 5 Program Pendidikan).	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 (lima) program. - Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 5 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA-SKPD 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 696.924.964.253 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.545.026.211.422	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.545.026.211.422	27,58 %	0 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (Anggaran)

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 635.826.077.669 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.331.680.643.174	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar 0 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.331.680.643.174	27,27 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 104.659.097.940 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 635.826.077.669	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 635.826.077.669	16,46 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 531.166.979.729 - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 635.826.077.669	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0	83,54 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Laporan keuangan ada, sebanyak 16 jenis, sbb : 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Penjabaran LRA 3. Neraca 4. CALK 5. Laporan Operasional 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Surat Pernyataan Mutlak 8. Laporan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan	Laporan keuangan ada, 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Penjabaran LRA 3. Neraca 4. CALK	Ada sebanyak 20	ada	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						9. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 10. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran 11. Berita Acara Pemeriksaan Kas 12. Buku Pajak PPn/PPh 13. Laporan Penutupan Kas Bulanan 14. Buku Pembantu Simpanan/ Bank Bendahara Pengeluaran 15. Buku Pembantu Kas Tunai 16. Buku Pembantu Panjar 17. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek 18. Rekap STS Pendapatan 19. Rekap STS 20. Rekap SP2D				
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada, dokumennya : Sertifikat Kantor, BPKB Kendaraan dinas, Dokumen kontrak, Laporan Mutasi Barang, Buku Bend Model 19 – 21. 1. Daftar mutasi barang semester I dan II tahun 2019 2. Rekap Daftar mutasi barang semester I dan II tahun 2019 3. Kartu Inventaris Barang (KIB) semester I dan II tahun 2019 4. Buku Inventaris (BI)	Ada : 1. KIR 2. KIB A sd F 3. Laporan mutasi Barang	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 tahun).

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						barang tahun 2019 5. Daftar mutasi barang tahun 2019				
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 (nol) asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak 1.451 asset. Rp. 15.514.138.489	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 (nol) asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak 1.451 asset. Rp. 15.514.138.489	100	100	Pembilang: 1) Sumber data berasal dari DPKAD (berita acara inventarisasi Rekonsiliasi penyerahan Barang/Aset) 2) Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan penyebut: aset layak pakai tetapi yang tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Web Kendal	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Web Kendal	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang --	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KENDAL
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2. URUSAN PERTANAHAN

diisi oleh perangkat daerah teknis, yang melaksanakan 2 (urusan)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Anggaran:11.545.268.000 Realisasi: 6.274.975.756 2. Program pembangunan turap/talud/bronjong Anggaran: 2.670.500.000 Realisasi: 2.577.795.050 3. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan Anggaran:157.658.655.106 Realisasi:147.856.005.182 4. Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Anggaran:289.950.000 Realisasi:249.045.250 5. Program tanggap darurat jalan dan jembatan Anggaran: 100.000.000 Realisasi: 54.997.500 6. Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Anggaran: 98.500.000 Realisasi: 90.321.000	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya Program Peningkatan, penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Anggaran:1.367.264.000 Realisasi:261.011.464	20 Program	1 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Anggaran:674.674.900 Realisasi:664.253.300 8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Anggaran:7.302.247.000 Realisasi:6.809.640.811 9. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Anggaran: 946.350.000 Realisasi: 763.807.876 10. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Anggaran:350.025.000 Realisasi:281.243.550 11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Anggaran:3.760.600.800 Realisasi:3.509.757.200 12. Program Pengendalian Banjir Anggaran: 5.360.450.000 Realisasi: 4.885.814.870 13. Program pembangunan infrastruktur perdesaan Anggaran:3.021.000.000 Realisasi:2.802.910.354 14. Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum Anggaran:3.316.481.400 Realisasi:3.198.610.131 15. Program Perencanaan Tata Ruang Anggaran: 98.250.000 Realisasi: 94.983.000				

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						16. Program Pemanfaatan Ruang Anggaran: 582.029.000 Realisasi: 545.207.890 17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Anggaran: 557.462.500 Realisasi: 537.850.971 18. Program Peningkatan, penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Anggaran: 1.367.264.000 Realisasi: 261.011.464 19. Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Anggaran: 224.150.600 Realisasi: 212.438.550 20. Program pengembangan data /informasi jasa konstruksi Anggaran: 47.767.400 Realisasi: 45.198.500				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP = Ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 37 yang terdiri dari: 1) SOP ttg surat keluar 2) SOP ttg surat masuk 3) SOP ttg cuti pegawai 4) SOP ttg pembuatan surat keputusan kenaikan gaji berkala 5) SOP ttg pengelolaan arsip surat 6) SOP ttg pengajuan kenaikan pangkat 7) SOP ttg pengelolaan asset 8) SOP ttg laporan barang milik daerah 9) SOP ttg pengajuan TPP 10) SOP ttg pengajuan surat	Apabila Ada, sebutkan ada 1 SOP SOP bidang pertanahan include di SOP Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena bidang yang menangani urusan pertanahan milik Pemda dipegang oleh Bidang Tata Ruang.	Ada SOP : 37 SOP	Ada 1 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						permintaan pembayaran (SPP) & surat perintah membayar (SPM) uang persediaan / ganti uang (UP/GU) dan tambah uang (TU) 11) SOP ttg penyusunan KUA PPAS 12) SOP ttg penyusunan laporan SPJ bulanan 13) SOP ttg penyusunan renja DPUPR 14) SOP ttg penyusunan renstra DPUPR 15) SOP ttg penyusunan RKA/DPA 16) SOP ttg system pelaporan 17) SOP ttg jasa pengendalian mutu laboratorium PU 18) SOP ttg penyewaan alat berat 19) SOP ttg perbaikan / penggantian sparepart 20) SOP ttg penyusunan perencanaan jalan dan jembatan 21) SOP ttg pembangunan jalan dan jembatan 22) SOP ttg pemeliharaan jalan dan jembatan 23) SOP ttg money jalan dan jembatan 24) SOP ttg pembuatan buku pola tanam 25) SOP ttg perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi 26) SOP ttg pengeringan jaringan irigasi 27) SOP ttg pengelolaan tanah lepe-lepe				

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						28) SOP ttg operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 29) SOP ttg pengendalian banjir 30) SOP ttg penyusunan DED perencanaan teknis bidang cipta karya melalui penyedia jasa 31) SOP ttg penyusunan DED perencanaan teknis bidang cipta karya (swakelola) 32) SOP ttg koreksi gambar permohonan IMB 33) SOP ttg pembangunan / rehab bangunan gedung 34) SOP ttg pengesahan DED bangunan gedung 35) SOP ttg system penyediaan air minum 36) SOP ttg system penyediaan sanitasi 37) SOP ttg penyusunan RDTR kawasan				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Perda No 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal	Perda No 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal	Ada	Ada	Sumber data di Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAA N DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan Eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 34 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 34 (sudah tercukupi)	- Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 4	100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi perangkat daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi perangkat daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, -.	tidak ada	tidak ada	Sumber data BKD/Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas perangkat daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap Total PNS Kabupaten	• PNS Perangkat Daerah, sebanyak 200 personil • Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.348 personil	• PNS Perangkat Daerah, sebanyak 8 personil • Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.348 personil	2,40 %	0,10 %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	• Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 24 org. • Pejabat yang ada, sebanyak 34 org.	• Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 2 org. • Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	70,59 %	50 %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang	• Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 34 org. • Jabatan yang ada, sebanyak 34 jbt.	• Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. • Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %	1000 %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 6 jenis, yg terdiri dari: 1) Renstra 2) Renja Penetapan 3) Renja Perubahan 4) RKA 5) DPA Penetapan 6) DPA Perubahan	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 6 jenis, yg terdiri dari: 1) Renstra 2) Renja Penetapan 3) Renja Perubahan 4) RKA 5) DPA Penetapan 6) DPA Perubahan	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	• Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 26 program. • Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 26 program.	• Include di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena bidang yang menangani urusan pertanahan milik Pemda dipegang oleh Bidang Tata Ruang DPUPR	100 %	100 %	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat	• Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 26 program. • Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak	• Include di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena bidang yang menangani urusan pertanahan milik Pemda dipegang oleh Bidang Tata Ruang DPUPR	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan renja-perangkat daerah ybs.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
					Daerah x 100%	26 program.				
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 26 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 26 program.	• Include di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena bidang yang menangani urusan pertanahan milik Pemda dipegang oleh Bidang Tata Ruang DPUPR	100 %	100 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, 223.353.656.146,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.545.026.211.422	• Total Anggaran Perangkat Daerah di bidang tata ruang tidak ada, jadi diikutkan anggaran urusan yang besar (DPUPR)	8,84 %	100 %	Sumber data dari APBD tahun 2018 terakhir. (anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 204.149.461.414 - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.331.680.643.174	• Realisasi Belanja Perangkat Daerah di bidang tata ruang tidak ada, jadi diikutkan anggaran urusan yang besar (DPUPR)	8,76 %	100 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 185.268.507.273 - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 203.700.841.098	• Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah di bidang tata ruang tidak ada, jadi diikutkan anggaran urusan yang besar (DPUPR)	90,75 %	100 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 18.880.954.141 - total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 19.652.815.048	• Realisasi Belanja tidak Langsung Perangkat Daerah di bidang tata ruang tidak ada, jadi diikutkan anggaran urusan yang besar (DPUPR)	9,25 %	100 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan perangkat daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. LRA 3. Calk	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1) Neraca 2) LRA 3) Calk	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. 1. KIR 2. KIB A sd F 3 Laporan Mutasi Barang	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya 1. KIR 2. KIB A sd F 3 Laporan Mutasi Barang	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 618.371.632.103,19	Include di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena bidang yang menangani urusan pertanahan milik Pemda dipegang oleh Bidang Tata Ruang DPUPR	100 %	100 %	Pembilang : 1) Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2) Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1) Papan pengumuman 2) Website	Sebutkan jenisnya 1) Papan pengumuman 2) Website	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Jumlah sebanyak 2 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang --	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/ Perangkat Daerah.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KENDAL
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1.URUSAN TENAGA KERJA
2.URUSAN TRANSMIGRASI

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan atau lebih

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ⁱⁱ (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Program yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Anggaran: 325.000.000 Realisasi: 316.165.055 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Anggaran: 3.165.000.000 Realisasi:3.038.438.706 3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Anggaran:1.830.000.000 Realisasi:1.736.132.750 4. Program Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Anggaran:850.000.000 Realisasi:828.348.660	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Anggaran:175.000.000 Realisasi:140.229.650 2. Program Transmigrasi Lokal Anggaran:324.500.000 Realisasi:319.481.850	5 Program	2 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						5. Program Penguatan Sarana Prasarana Kelembagaan Pelatihan Anggaran:200.000.000 Realisasi:186.686.000				
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 53 yang terdiri dari: 1) SOP ttg Pendaftaran pelatihan 2) SOP ttg Pembuatan Kartu Pencari kerja 3) SOP ttg Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 4) Dst -----	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1) SOP ttg Pengeraah dan Fasiltasi perpindahan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM 2) SOP ttg Penjajagan Lokasi Transmigrasi untuk penempatan calon tranmigran 3) SOP ttg Penyuluhan Tranmigrasi lokal	Ada 53 SOP	Ada 3 SOP:	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaran Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan: 2 Perda 1. Perda no. 10 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kab. Kendal NO.3 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Restribusi Perpanjangan ijin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Kendal. 2. Perda No 9 tahun 2012 tetang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia Kabupaten Kendal	PERDA sebanyak 0	ada	Tidak ada	Sumber data di Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAA N DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada	- Jabatan yang 14 ada sebanyak - Jabatan yang harus ada,	- Jabatan yang terisi sebanyak 1 - Jabatan yang ada,	100 %	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah 2019

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				terisi	x 100%	sebanyak 14	sebanyak 1			
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 1. Fungsional Pengantar Kerja 2. Fungsional Mediator 3. Fungsional Instruktur	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Tidak ada	Ada	tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	• PNS Perangkat Daerah, sebanyak 46 personil • Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.348 personil	• PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah, sebanyak 2 personil • Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.425 personil	0,55 %	0,02%	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019/ BKD.
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	• Pejabat yang telah Mengikut Diklatpim, sebanyak 14 org. • Pejabat yang ada, sebanyak 14 org.	• Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 1 org. • Pejabat yang ada, sebanyak 1 org.	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang	• Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org. • Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.	• Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 1 org. • Jabatan yang ada, sebanyak 1 jbt.	100 %	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA PD -RENJA PD -RKA- PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak jenis, yg terdiri dari: 1) Renstra 2) Renja 3) RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1) Renstra 2) Renja 3) Rka	3 jenis dokumen	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 12 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 12	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 2	100%	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA 12 program Perangkat Daerah, sebanyak 12 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 12- program.	- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah 12 Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program. - Jumlah 12 Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 12 program.	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 2 program.	100 %	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, Rp.13.728.984.505 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 2.545.026.211.422	- Total Realisasi belanja belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp, 0,- - Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.545.026.211.422,-	0,54 %	0 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 12.099.407.488,- - Total Belanja Perangkat Daerah, Sebesar Rp.2.331.680.643.174,-	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp 0 - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 2.331.680.643.174	0,52 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak	15	Total Belanja Langsung dari	Total Belanja Langsung dari total belanja	Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar	Realisasi Belanja Langsung Perangkat	64,69 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Langsung		total belanja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah x 100%	Rp.7.827.123.830 • Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.12.099.407.488,-	Daerah, sebesar Rp.0 • Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.0			
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	• Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.4.272.283.658, • Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.099.407.488,-	• Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0 • Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp 0	35,31 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, , LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1) Neraca 2) LRA 3) Calk	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1) Neraca 2) LRA 3) Calk	Ada Sebanyak 3 jenis :	Tidak Ada/ Ada sebanyak 3 jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya 1) KIR 2) KIP 3) Mutasi Aset	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya 1) KIR 2) KIP 3) Mutasi Aset	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	• Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 0 • Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 15.982.030.661,--	• Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp 0 • Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp.13.951.814.236	1000 %	100 %	Pembilang : 1) Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2) Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan /dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ Prasarana informasi : 1) Papan Pengumuman 2) PosPengaduan	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1) Papan Pengumuman 2) Leaflet 3) Mobil keliling 4) Pengumuman di Mass	Sebutkan jenisnya 1) Papan Pengumuman	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Jumlah sebanyak 1 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				3) Leaflet 4) Mobil keliling 5) Pengumuman di Mass Media		Media				
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang Pelayanan Kartu Pencari Kerja dan Rekomendasi Pasport Pekerja Migran Indonesia	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang --	ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KENDAL
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1.Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
2.Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan atau lebih

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RAAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan: Angg : 144.750.000 Real : 143.744.000 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak : Angg : 166.095.000 Real. : 159.062.750 3. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan Perempuan : Angg. : 282.410.000 Real. : 263.888.500 4. Program peningkatan peranserta dan kesetaraan gender dalam pembangunan : Angg : 100.725.000 Real : 99.067.864	1. Program Keluarga Berencana : Angg. : 8.372.345.000 Real. : 7.317.629.064 2. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR : Angg. : 95.000.000 Real. : 95.000.000 3. Pogram penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga : Angg. : 74.140.0000 Real. : 74.140.0000	4 Program	3 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1) SOP ttg Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender dan Anak Kab.Kendal	Apabila Ada, 9 sebutkan ada banyak 1 (satu) yang terdiri dari: 1) SOP ttg Renja OPD 2) SOP ttg Penyusunan Laporan POK 3) SOP ttg Penyusunan Evaluasi Kinerja Kegiatan	1 SOP	9 SOP	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
							4) SOP ttg Penyusunan LKjIP OPD 5) SOP ttg Penyusunan RKA OPD 6) SOP ttg penyusunan DPA OPD 7) SOP ttg Penyusunan Surat Pertanggung Jawaban 8) SOP ttg Pengajuan Surat Pengajuan Pencairan (SPP) 9) SOP ttg Penyaluran Alat Kontrasepsi (Alkon)			melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	1. Perda No 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak 2. Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan berbasis Gender dan Anak di Kab Kendal	• Tidak ada	ada	Tidak ada	Sumber data di Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAA N DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	• Jabatan yang terisi sebanyak : 4 • Jabatan yang harus ada, sebanyak : 4	• Jabatan yang terisi sebanyak 12 • Jabatan yang ada, sebanyak 12	100 %	100 %	Sumber data BKD/ DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional : 0	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Penyuluh keluarga berencana 44 org	Tidak Ada	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	• PNS Perangkat Daerah, sebanyak : 4 personil • Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.348 personil	• PNS Perangkat Daerah, sebanyak : 28 personil Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.348 personil	0,04 %	0,32 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019/ BKD.
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x100%	• Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak :3 org. • Pejabat yang ada, sebanyak : 3 org.	• Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak : 12 org. • Pejabat yang ada, sebanyak : 12 org.	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 3 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 12 jbt.	75 %	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA PD -RENJA PD -RKA- PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak : 4 jenis, yg terdiri dari: 1) DPA 2) Renstra 3) Renja 4) RKA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak : 4 jenis, yg terdiri dari: 1) DPA 2) Renstra 3) Renja 4) RKA	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak : 4 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak : 12 program	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak : 8 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak : 12 program	33,33 %	66,67 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan renja-perangkat daerah ybs
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA perangkat daerah	11	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA perangkat daerah	Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA perangkat daerah dibagi jumlah program dalam RKA perangkat daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA perangkat daerah, sebanyak ; 4 program - Jumlah program dalam RKA perangkat daerah, sebanyak 4 program	- Jumlah Program RENJA perangkat daerah yang diakomodir dalam RKA perangkat daerah, sebanyak ; 8 program - Jumlah program dalam RKA perangkat daerah, sebanyak 8 program	100. %	100. %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ; 4 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak : 4 program.	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak ; 8 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak : 8 program.	100 %	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAA N KEUANGAN	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah	Alokasi anggaran Perangkat Daerah	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar	Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp, 0	0,63%	0 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
	DAERAH			terhadap to tal belanja APBD	dibagi total APBD x 100%	Rp.15.841.689.372 • Total Belanja APBD, sebesar Rp.2.545.026.211.422	• Total Belanja APBD, sebesar Rp.2.545.026.211.422			(anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	• Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 13.396.751.136 • Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.331.680.643.174	• Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp.0 • Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.331.680.643.174	0,57 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	• Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 9.608.354.773 • Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.396.751.136	• Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0 • Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.0	71,72 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	• Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.788.396.363 • Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.396.751.136	• Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 • Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0	28,28 %	0 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, , LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis, sbb: 1) Laporan realisasi Anggaran / LRA 2) Neraca Keuangan 3) CALK	Apabila Ada, Laporan keuangan ada sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Laporan realisasi Anggaran / LRA 2. Neraca Keuangan 3. CALK	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : 1. Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Barang (5 thn terakhir) 2. Rincian asset yang digunakan 3. Rincian Total Aset	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya : 1.Berita Acara Pelaksanaan Inventarisasi Barang (5 thn terakhir) 2.Rincian asset yang digunakan 3.Rincian Total Aset	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebesar 136.791.500 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 18.757.772.000	- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 136.791.500 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, Sebesar Rp. 18.757.772.000	0,73%	0,73 %	Pembilang : 1) Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2) Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/ dimanfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1) PapanPengumuman 2) Pos Pengaduan 3) Leaflet 4) Mobil keliling 5) Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1) Pos Pengaduan 2) Pengumuman di Mass Media (Website, Aplikasi) 3) Publikasi Media (Leaflet, Majalah, Tabloit)	Sebutkan jenisnya 1) PapanPengumuman 2) Leaflet 3) Mobil keliling 4) Pengumuman di Mass Media (Website, Aplikasi) 5) Publikasi Media (Leaflet, Majalah, Tabloit)	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Jumlah sebanyak 5 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---	Tidak ada	Tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KENDAL
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. PANGAN
2. PERTANIAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan atau lebih

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Programyang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Anggaran Rp. 882.695.000 Realisasi Rp. 697.904.750	Jumlah 10 program Total anggaran Rp. 10.075.666.787 Total realisasi • Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Anggaran Rp. 568.127.500 Realisasi Rp. 526.074.745 • Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan Anggaran Rp. 587.295.000 Realisasi Rp. 409.755.500 • Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Anggaran Rp. 461.000.000 Realisasi Rp. 416.836.279 • Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Anggaran Rp. 469.977.500 Realisasi Rp.	1 program	10 program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
							401.530.876 • Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Anggaran Rp. 5.961.844.787 Realisasi Rp. 5.871.312.768 • Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan Anggaran Rp. 1.087.592.000 Realisasi Rp. 967.080.502 • Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Anggaran Rp. 659.195.000 Realisasi Rp. 553.115.850 • Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Anggaran Rp. 46.985.000 Realisasi Rp. 46.552.500 • Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Anggaran Rp. 73.650.000 Realisasi Rp. 73.580.000 • Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan			

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
							Anggaran Rp. 160.000.000 Realisasi Rp. 153.921.324			
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian/LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada	1. SOP Penanganan daerah rawan pangan 2. SOP Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 3. SOP Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	1. SOP Optimalisasi Kelompok tani Perkebunan 2. SOP Pemurnian Benih Bibit Tembakau 3. SOP Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 4. SOP Pengembangan Tanaman Unggul Perkebunan 5. SOP Pengalokasian Pupuk Bersubsidi 6. SOP Rekomendasi Teknis Kegiatan Irigasi Sarpras 7. SOP Bimbingan Teknis Perbenihan/ Perbibitan 8. SOP Pelatihan Budidaya Tanaman Buah Buahan 9. SOP Pengajuan Rekomendasi Solar 10. SOP Rekomendasi Teknis Usaha Peternakan 11. SOP Optimalisasi Inseminasi Buatan 12. SOP Keterangan Kesehatan Bahan asal Hewan	3 SOP	12 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada	- Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kendal - Peraturan Bupati Kendal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kendal	- Perda No 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani - Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	ada	ada	Sumber data di Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAA N DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 4 orang	- Jabatan yang terisi sebanyak 25 orang - Jabatan yang ada, sebanyak 27 orang	100 %	93,55 %	Sumber data BKD/ DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Tidak ada	Ada , 1. Penyuluh Pertanian = 49 orang 2. Medik Veteriner muda = 2 orang 3. Petugas Informasi Harga Pasar = 1 orang	Tidak ada	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAA N KEPEGAWAIA N DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani 7 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.348 personil	- PNS yang menangani 121 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.348 personil	0,084	1,45	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019/ BKD

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai perjenjangan, sebanyak 4 org. - Pejabat perangkat daerah yang ada, sebanyak 28 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim sesuai perjenjangan, sebanyak 20 org. - Pejabat perangkat daerah yang ada, sebanyak 28 org.	14,28 %	71,43 %	Sumber data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated tahun 2019
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak 4 org. - Pejabat Perangkat Daerah yang ada sebanyak 28 org	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 24 org. - Pejabat perangkat daerah yang ada, sebanyak 28 org	14,28 %	85,71 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah - RENSTRA PD - RENJA PD - RKA PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: - Renstra DPP - Renja DPP - RKA DPP - DPA DPP	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: - Renstra DPP - Renja DPP - RKA DPP - DPA DPP	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA PD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 1	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 16 program. - Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 16	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 16 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 16 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 16 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 16 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Anggaran perangkat daerah terhadap total belanja APBD	Total alokasi anggaran belanja perangkat daerah dibagi total APBD x 100%	- Total anggaran belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 1.719.461.779 - Total belanja APBD sebesar Rp. 2.545.026.211.422,-	- Total anggaran belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 26.850.778.257 - Total anggaran belanja APBD sebesar Rp. 2.545.026.211.422,-	0,67 %	10,55 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir (anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Daerah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	- Realisasi belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 1.509.385.205 - Total realisasi belanja APBD, sebesar Rp. 2.331.680.643.174	- Realisasi belanja Perangkat Daerah urusan, sebesar Rp. 25.672.873.629 - Total realisasi belanja APBD, sebesar Rp. 2.331.680.643.174	0,065 %	1,10 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran belanja	15	Total Belanja	Total Belanja	Realisasi belanja langsung	Realisasi belanja	2,57 %	42,84 %	Sumber data dari realisasi

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		langsung dan tidak langsung		Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	Perangkat Daerah, sebesar Rp. 697.904.750 • Total realisasi belanja perangkat daerah, sebesar Rp. 27.182.258.834	langsung perangkat Daerah, sebesar Rp. 11.645.854.331 • Total realisasi belanja perangkat daerah, sebesar Rp. 27.182.258.834			APBD tahun 2019 terakhir
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	• Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 811.480.455 • Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 27.182.258.834	• Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 14.027.019.298 • Total Realisasi belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 27.182.258.834	2,98 %	51,60 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1) LRA 2) CALK 3) Neraca	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1) LRA 2) CALK 3) Neraca	Ada sebanyak k 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOAA N BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya 1) KIR 2) KIP 3) Mutasi Aset	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya 1) KIR 2) KIP 3) Mutasi Aset	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD, dukumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	• Asset yang tidak digunakan sebesar Rp. 19.236.000,- • Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 40.400.272.091,-	• Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp. 188.162.023,- • Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 40.400.272.091	0,05 %	0,46 %	Sumber data berasal dari BPKAD (berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset)

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan Pangan	Urusan Pertanian	Urusan Pangan	Urusan Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1) Papan Pengumuman 2) Leaflet 3) Pengumuman di media massa 4) Internet	Sebutkan jenisnya 1) Papan Pengumuman 2) Leaflet 3) Pengumuman di media massa 4) Internet	Jumlah sebanyak k 4 jenis.	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data lampirkan foto)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Tidak ada	Ada, survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penggunaan Kartu Tani	Ada	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KENDAL
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2. URUSAN PARIWISATA

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan atau lebih

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Prog. Peningkatan peran serta kepemudaan : Angg : 2.465.000.000 Real : 2.304.540.750 2. Prog Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda : Angg : 45.000.000 Real. : 44.471.200 3. Prog Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda : Angg. : 200.000.000 Real. : 196.699.700 4. Prog pembinaan dan pemasyarakatan olahraga : Angg : 6.852.000.000 Real : 6.791.480.100 5. Prog peningkatan sarpras olahraga Angg : 1.405.000.000 Real : 1.363.803.470	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Prog. Pemasaran pariwisata : Angg. : 812.370.000 Real. : 794.261.587 2. Prog Destinasi Pariwisata : Angg. : 4.611.673.000 Real. : 1.164.063.148 3. Prog pengembangan kemitraan : Angg. : 1.575.073.000 Real. : 1.430.640.700 4. Prog pengembangan kerja sama pengelolaan kekayaan budaya : Angg. : 150.000.000 Real. : 147.572.000	5 Program	4 Program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 32 yang terdiri dari: 1. SOP ttgPenyusunan	Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP ttgPelaksanaan	32 Jumlah	3 Jumlah	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		Kementerian /LPNK				laporan SPJ 2. SOP ttg Penyusunan Laporan keuangan Semesteran 3. SOP ttg Penyusunan Laporan Fungsional dan Laporan Administratif 4. SOP ttg Penyusunan LRA, Neraca, Laporan Mutasi Aset, CaLK 5. SOP ttg Penyusunan Renstra SKPD 6. SOP ttg Penyusunan RKA/DPA 7. SOP ttg Penyusunan Renja OPD 8. SOP ttg Penyusunan LKjIP 9. SOP ttg Penyusunan POK 10. SOP ttg Penyusunan LKPJ/LPPD 11. SOP ttg Monitoring dan Evaluasi kegiatan OPD 12. SOP ttg Tindak lanjut LHP 13. SOP ttg Penyusunan usulan pergeseran/perubahan anggaran 14. SOP ttg Evaluasi RKPD dan Evaluasi Capaian RFJMD 15. SOP ttg Usula kenaikan pangkat 16. SOP ttg Pengusulan ujian dinas 17. SOP ttg Pengangkatan CPNS ke PNS 18. SOP ttg Penyusunan SKP dan penilaian prestasi kerja 19. SOP ttg TUB-PBB 20. SOP ttg Pelaksanaan	pemasaran dan promosi pariwisata 2. SOP ttg Pemantauan pendapatan 3. SOP ttg Penagihan dan pemungutan retribusi pariwisata			ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						Paskibraka 21. SOP ttg Pengiriman Organisasi /kelompok pemuda 22. SOP ttg peringatan hari sumpah pemuda 23. SOP ttg Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda 24. SOP ttg Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda/Sekolah Bisnis Kendal 25. SOP ttg Prakualifikasi Teknopraneur muda pemula 26. SOP ttg Gerak jalan 28 K 27. SOP ttg Coaching Clinic 28. SOP ttg Pemberian penghargaan atlet dan pelatih berprestasi 29. SOP ttg Pembinaan cabang olahraga prestasi di Tk. Daerah 30. SOP ttg Pengiriman mengikuti kejuaraan olahraga 31. SOP ttg Penyelenggaraan Kompetisi 32. SOP ttg Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tk. Kabupaten				
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	Apabila ada sebutkan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal	Ada	Ada	Sumber data di Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 10 - Jabatan yang ada, sebanyak 10	- Jabatan yang terisi sebanyak 4 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %	100 %	Sumber data BKD/DAK Kabupaten Daerah

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 0	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 0	tidak ada	tidak ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2018.
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Kab	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kab	- PNS yang menangani urusan (1) Perangkat Daerah, sebanyak 27. Personil - Total PNS Kab, sebanyak 8.348 personil	- PNS yang menangani urusan (2) Perangkat Daerah, sebanyak 33. Personil - Total PNS Kab, sebanyak 8.348 personil	0,32 %	0,40 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated Tahun 2019/ BKD.
			7	Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang telah Mengikuti Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 10 org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4 org.	80 %	25 %	Sumber data BKD. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019.
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 10 org - Jabatan yang ada, sebanyak 10 jabatan.	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 Jabatan	100 %	100 %	Sumber Data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/ updated Tahun 2019.
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di - Perangkat Daerah RENSTRA Perangkat Daerah - RENJA Perangkat Daerah - RKA- Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, ygterdiridari: - Renstra PD. - Renja PD - RKA/DPA PD	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis,ygterdiridari: - Renstra PD. - Renja PD - RKA/ DPA PD	3 jenis dokumen	3. jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/Perangkat Daerah yang bersangkutan
		Sinkronisasi Program RENJA Perangkat Daerah	10	Jumlah Program yang RKPDP	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam Renja	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKPDP tahun 2018 dan Renja-

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
		dengan Program RKPD		diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah	RENJA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RENJA Perangkat Daerah x 100%	Perangkat Daerah, sebanyak 10 program. • Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan , sebanyak10 program	Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. • Jumlah Program Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan sebanyak 4 program			Perangkat Daerah ybs.
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	• Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak10 program. • Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program .	• Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak4 program. • Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2018 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	• Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10 program • Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 10. program.	• Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program • Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah sebanyak 4 program	100 %	100 %	Mengacu dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Anggaran belanja Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Total Alokasi anggaran belanja Perangkat Daerah dibagi total Anggaran APBD x 100%	• Total Anggaran belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 16.980.303.279,- • Total Belanja APBD, sebesar Rp. 2.545.026.211.422,-	• Total Anggaran belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.10.473.960.307, • Total Anggaran Belanja APBD, sebesar Rp 2.545.026.211.422,-	0,67 %	0,41 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total Realisasi Belanja APBD	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi Belanja APBD x 100%	• Realisasi Belanja Perangkat Daerah , sebesar Rp. 16.376.281.254,- • Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp 2.331.680.643.174,-	• Realisasi Belanja Perangkat Daerah Urusan, sebesar Rp.6.859.509.017 • Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 2.331.680.643.174,-	0,70 %	0,29 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	• Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 13.233.708.091,- • Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp.	• Realisasi Belanja-Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.3.984.664.710,- • Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar	56,95 %	17,15 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						23.235.790.271,-	Rp. 23.235.790.271,-			
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.142.5731.643 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 23.235.790.271,-	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 2.874.844.307 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 23.235.790.271,-	13,52 %	12,37 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2018 terakhir.
		Laporan keuangan Perangkat Daerah	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, CaLK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, CaLK)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA. 2. Neraca.. 3. CaLK.	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca. 3. CaLK.	Ada sebanyak: 3 jenis:	Ada sebanyak: 3 jenis:	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/ asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/ asset Perangkat Daerah	Ada, jenis dokumennya. 1. KIB A – E 2. Daftar Mutasi aset tetap 3. Rekap Mutasi aset tetap 4. Daftar Mutasi Penyusutan aset tetap 5. Mutasi Penyusutan aset tetap 6. Kartu inventaris ruangan	Ada, jenis dokumennya. 1. KIB A – E 2. Daftar Mutasi aset tetap 3. Rekap Mutasi aset tetap 4. Daftar Mutasi Penyusutan aset tetap 5. Mutasi Penyusutan aset tetap 6. Kartu inventaris ruangan	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan sebesar Rp 0,- - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp 117.243.193.957,-	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,- asset. - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebesar Rp. 117.243.193.957,-.	100 %	100 %	Sumber data dari BPKAD
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling	Sebutkan jenisnya : 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling	Jumlah sebanyak - 4 jenis.	Jumlah sebanyak - 4 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data lampirkan foto)

No	ASPEK	FOKUS	No	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (1)	Urusan (2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				Media Massa						
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan pelayanan publik	Ada	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda/Perangkat Daerah

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : KENDAL
NAMA SKPD : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. URUSAN PERPUSTAKAAN
2. URUSAN KEARSIPAN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan atau lebih

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	1	Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis)	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Anggaran:317.251.500 Realisasi:300.934.600	Sebutkan Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) dan Nilai Anggaran serta Realisasi nya 1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Anggaran: 25.000.000 Realisasi: 21.398.250 2. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Anggaran: 122.500.000 Realisasi:108.536.568 3. Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Anggaran: 53.420.000 Realisasi: 50.528.500 4. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi Anggaran:175.000.000 Realisasi:26.277.600	1 program	4 program	Lihat di APBD Lampiran I.3 (MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian / LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah Keberadaan SOP	Ada 12 SOP yang terdiri dari: 1. Pengadaan bahan pustaka 2. Pengolahan bahan pustaka 3. Pembuatan kartu anggota 4. Peminjaman dan pengembalian bahan pustaka 5. Layanan internet 6. Perpustakaan keliling SLPT / Silang Layanan Perpustakaan Terpadu 7. Layanan anak 8. Lomba perpustakaan desa	Ada 12 SOP yang terdiri dari: 1. Pengelolaan arsip dinamis aktif 2. Alih media arsip 3. Fumigasi arsip 4. Layanan informasi kearsipan 5. Penyelenggaraan lomba tertib arsip desa/ kelurahan 6. Peminjaman arsip inaktif 7. Pemusnahan arsip diatas 10 tahun 8. Pemusnahan arsip dibawah 10 tahun	Ada 12 SOP	Ada 12 SOP	SOP yang dimaksud adalah SOP teknis. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis.

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
						9. Lomba bercerita siswa SD/MI 10. Lomba penulisan artikel 11. Lomba menggambar siswa PAUD 12. Supervisi perpustakaan	9. Penelusuran arsip 10. Pengolahan arsip inaktif pada OPD 11. Penyerahan arsip inaktif diatas 10 tahun 12. Pengolahan arsip statis			
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	3	Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan	Ada atau tidak ada	Apabila ada sebutkan Tidak ada	Apabila ada sebutkan Tidak ada	tidak ada	tidak ada	Sumber data di Bagian Hukum
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 8 - Jabatan yang ada, sebanyak 8	- Jabatan yang terisi sebanyak 3 - Jabatan yang ada, sebanyak 4	100 %	75 %	Sumber data BKD/ DUK Perangkat Daerah
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Pustakawan.	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, Arsiparis.	Ada	Ada	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/updated Tahun 2019
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS	Jumlah PNS perangkat daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS yang menangani urusan (1) perangkat daerah , sebanyak 20personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.383personil	- PNS yang menangani urusan (2) perangkat daerah , sebanyak 11personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 8.383personil	0,21%	0,14%	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			7	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan	Pejabat yang telah mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 8org.	- Pejabat yang telah mengikuti diklatpim, sebanyak 1 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 4org.	0 %	25 %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat perangkat daerah yang	- Pejabat yang memenuhi Syarat kepangkatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbt.	- Pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan, sebanyak 4 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 4 jbt.	100 %	100 %	Sumber data mengacu pada data DUK perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari BKD

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		Capaian Kinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh perangkat daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di perangkat daerah berikut -RENSTRA PD -RENJA PD -RKA- PD -DPA- PD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA 4. DPA	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi program RENJA perangkat daerah dengan program RKPD	10	Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam program RENJA perangkat daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan perangkat daerah berikut jumlahnya	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Jumlah Program dalam Renja yang ditetapkan, sebanyak 1 program	- Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam Renja yang ditetapkan, sebanyak 4 program	100 %	100 %	Sumber data mengacu pada data perencanaan perangkat daerah terakhir atau data yang berasal dari Bappeda
		Sinkronisasi program RKA Perangkat Daerah dengan Program RENJA Perangkat Daerah	11	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	- Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	100 %	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan Renja- Perangkat Daerah ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 1 program.	- Jumlah Program RKA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 4 program.	100 %	100 %	Sumber data dari dokumen RKA- Perangkat Daerah tahun 2019 dan dokumen DPA- Perangkat Daerah ybs tahun 2019
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.741.326.611 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.2.545.026.211.422	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Belanja APBD, sebesar Rp.2.545.026.211.422 (karena anggarannya arsip gabung perpustakaan)	0,23 %	100 %	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
		Realisasi Belanja Perangkat Daerah	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total	Realisasi Belanja Perangkat Dearah dibagi total Realisasi	Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 5.522.084.659	- Realisasi Belanja Perangkat Daerah sebesar Rp. 0 - Total Realisasi Belanja APBD,	0,27%	100 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		CapaianKinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
				Realisasi Belanja APBD	Belanja APBD x 100%	Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp.2.331.680.643.174	sebesar Rp.2.331.680.643.174 (karena anggarannya arsip gabung perpustakaan)			
		Besaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung	15	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Langsung dari total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.770.877.529 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.522.084.659	- Realisasi Belanja Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp.0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 (karena anggarannya arsip gabung perpustakaan)	32,07 %	100 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
			16	Total Belanja Tidak Langsung dari total belanja Perangkat Daerah	Total Belanja Tidak Langsung dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 3.751.207.130 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.522.084.659	- Realisasi Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 - Total Realisasi Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 0 (karena anggarannya arsip gabung perpustakaan)	67,93 %	100 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. Neraca 2. CALK 3. LRA	Ada sebanyak 3 jenis	Ada sebanyak 3 jenis	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Adanya inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang/asset Perangkat Daerah	Ada, Laporan Mutasi Barang	Ada, Laporan Mutasi Barang	Ada	Ada	Sumber data dari BPKAD , dokumennya (Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.)
		Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak Rp. 2.127.736.765,37	Include di urusan Perpustakaan	100 %	100 %	Pembilang : 1) Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisa si Rekonsilias i Penyeraha

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data		CapaianKinerja		KETERANGAN
						Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	Urusan (1) Perpustakaan	Urusan (2) Kearsipan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(8A)	(8B)	(9)
										n Barang/As et) 2) Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/di manfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dima nfaatkan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/ prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1.Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Mobil Perpustakaan Keliling 4. Website SKPD	Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2. Leaflet 3. Website SKPD	Jumlah sebanyak 4 jenis.	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (data foto dilampirkan)
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -	tidak ada	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/pelangga n yang dilakukan oleh Pemda/ Perangkat Daerah.

iProgram Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

iiProgram Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.